



Buku Seri
Sejarah Islam
Indonesia
Modern

Gerakan-Gerakan ISLAM Indonesia Kontemporer

Editor: Muhammad Wildan



Editor: Muhammad Wildan



Gerakan - Gerakan **ISLAM** **Indonesia Kontemporer**

**~Zuhroh Lathifah~Syamsul Arifin~ Mundzirin Yusuf ~Riswinarno~ Badrun~
~Dudung Abdurrahman~ Siti Maimunah ~Nurul Hak~ Musa~Machasin~
~Sujadi~Soraya Adnani~Muhammad Wildan~ Maharsi~Fatiyah~**



Gerakan - Gerakan
ISLAM
Indonesia Kontemporer

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

Copyright @ 2020 Penulis

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

ISBN: 978-979-8548-12-3

Penulis : Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf,
Riswinarno, Badrun, Dudung Abdurrahman,
Siti Maimunah, Nurul Hak, Musa, Machasin, Sujadi,
Soraya Adnani, Muhammad Wildan, Maharsi, Fatiyah

Editor : Muhammad Wildan

Setting Layout : Tim Adab Press

Desain Cover : Tim Adab Press

Cetakan ke 1 : November 2020

Diterbitkan oleh



Adab Pres

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia

Email: Adab_press@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
SAREKAT ISLAM PELOPOR GERAKAN KEBANGSAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang Lahirnya SDI	2
C. Ideologi dan Pemikiran	7
D. SI Menjadi Partai Politik.....	14
E. Perpecahan di Tubuh SI	16
F. SI pada Masa Reformasi	16
G Penutup.....	20
KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH BAGI BANGSA INDONESIA	24
A. Pendahuluan	24
B. Latar Belakang didirikannya Muhammadiyah	25
C. Ideologi Muhammadiyah	29
D. Implementasi dan Respons Masyarakat	30
E. Kontribusi Muhammadiyah	33
F. Perkembangannya dan Respons Masyarakat.....	47
G. Muhammadiyah Dewasa Ini dan Kendalanya	45
H. Penutup.....	47
ISLAM, PEREMPUAN, DAN KEMANUSIAAN:	
‘Aisyiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru di Awal Abad 21 ..	51
A. Pendahuluan	52



B. Kelahiran dan Perkembangan ‘Aisyiyah	53
C. Hati dan Jantung Pemikiran ‘Aisyiyah (Ideologi).....	55
D. Reformasi dan Langkah Baru Aisyiyah.....	69

REVITALISASI TRILOGI UKHUWAH NU DI ERA REFORMASI:

Islamiyyah, Wathaniyyah Dan Insaniyyah	77
A. Pendahuluan	78
B. NU dan Sejarah Pemikiran Trilogi Ukhuwah.....	81
C. Trilogi Ukhuwah: Pengejawantahan Ideologi NU	86
D. Respons Terhadap Persoalan Kontemporer.....	89
E. Penutup	96

DINAMIKA KONTEMPORER PERSATUAN ISLAM

(PERSIS), 1945-2015.....	99
A. Pendahuluan	99
B. Pemikiran Keagamaan	100
C. Orientasi Sosial-politik.....	103
D. Pengembangan Pendidikan dan Dakwah	109
E. Kesimpulan	115

KIPRAH & PERGULATAN MUI DALAM PEMBANGUNAN
INDONESIA (1975-2020).....

.....	119
A. Pendahuluan	119
B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	120
C. Kiprah MUI di Indonesia	130
D. MUI dalam Sorotan	135
E. Penutup	140

AKAR IDEOLOGI DAN GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN
MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA).....

.....	144
A. Pendahuluan	144
B. Latar Belakang Berdirinya MTA	147



C. Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan .	150
D. Profil Abdullah Thufail dan Genealogi Ideologi MTA..	152
E. Gerakan Sosial Keagamaan MTA	156
F. Kesimpulan.....	161
HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Bergerilya Di Antara Islam dan Islamisme.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Latar Belakang Sejarah.....	166
C. Ideologi Keagamaan.....	172
D. Kiprah dan Dinamika Gerakan	176
E. Penutup	180
AHMADIYAH DI INDONESIA.....	185
A. Pendahuluan	185
B. Tentang Berdirinya Ahmadiyah.....	186
C. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).....	190
D. Ajaran Pokok Ahmadiyah.....	194
DEWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA: Berdakwah & Berpolitik Di Era Orde Baru Dan Reformasi	198
A. Pendahuluan	154
B. Mengawal DDII.....	200
C. Aktivitas DDII pada Era Orba dan Reformasi	206
D. Epilog	217
DINAMIKA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DALAM SEJARAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA.....	225
A. Pendahuluan	225
B. Sejarah Berdirinya ICMI.....	227
C. Ideologi ICMI: Islam Kultural	230



D. Dinamika Organisasi (Internal).....	236
E. Gerakan Sosial Keagamaan	244
F. Penutup	246

PERJUANGAN KONSTITUSIONAL PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA DAN TANTANGAN ISLAMISME.....	248
A. Pendahuluan	248
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	249
C. Dari Gerakan Dakwah ke Partai Politik	252
D. PKS: Partai dan Gerakan Dakwah	256
E. Ideologi PKS	257
F. PKS, Demokrasi, dan Kebangsaan	261
G. Antara Islamisme dan Post-Islamisme	262
H. Dinamika dan Arah Gerakan PKS.....	264
I. Penutup	267

KARAKTERISTIK JAMAAH TABLIGH DI INDONESIA

A. Pendahuluan	270
B. Sejarah Jamaah Tabligh.....	272
C. Sistem Dakwah	278
D. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.....	281
E. Kehidupan Budaya.....	284
F. Penutup	288

MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI): SEJARAH,

PEMIKIRAN, DAN GERAKAN	291
A. Pendahuluan	291
B. Sejarah Berdiri.....	292
C. Pemikiran	296
D. Gerakan	300
E. Penutup	303



PERJUANGAN KEBANGSAAN & PENDIDIKAN AL-IRSYAD	307
A. Pendahuluan	307
B. Al-Irsyad Berdiri dan Berkembang	309
C. Al-Irsyad, dari Pendidikan ke Politik	317
D. Al-Irsyad Kembali Sebagai Gerakan Pendidikan.....	323
E. Penutup	325
BIODATA PENULIS.....	328

DINAMIKA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DALAM SEJARAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA

Soraya Adnani

Kelahiran ICMI di tahun 1990 ditengarai oleh berbagai pihak sebagai wujud nyata dari semakin membaiknya hubungan antara Islam dengan Pemerintah di masa Orde Baru. Akan tetapi di sisi yang lain, ada yang beranggapan bahwa kelahiran ICMI tidak bisa dipisahkan dari usaha elite Orde Baru untuk mempertahankan *status quo* di bidang politik. Hal ini tentunya dikaitkan dengan figur B.J. Habibie sebagai salah satu pembantu terdekat Presiden Soeharto. Terlepas dari benar tidaknya *status quo* itu namun yang pasti adalah bahwa ICMI lahir dan mampu berkontribusi mengintegrasikan hubungan umat Islam dengan birokrasi Orde Baru yang sebelumnya ada jarak.

A. Pendahuluan

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (yang selanjutnya ditulis ICMI) keberadaannya di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru sangatlah dinanti-nantikan. Bisa dikatakan demikian, karena ICMI dianggap sebagai salah satu ormas di Indonesia yang mampu menjembatani polemik antara umat Islam di satu pihak dengan pemerintah, dipihak yang lain. Pada masa Orde Baru, keberadaan organisasi Islam banyak mendapat intervensi dari Pemerintah. Sebagai contoh intervensi itu adalah ketika diadakan pemilihan ketua Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di tahun 1968 dan yang terpilih pada saat itu adalah Mr. Mohammad Roem (tokoh Masyumi), maka



oleh pemerintah Orde Baru, Mr. Mohammad Roem ditolak untuk menjadi ketua Parmusi. Penolakan tersebut dengan alasan karena Mr. Mohammad Roem adalah mantan pemimpin Masyumi. Adanya intervensi tersebut menyebabkan munculnya kekecewaan dari berbagai pihak. Kekecewaan umat Islam itu dituangkan dalam surat kabar dan majalah-majalah Islam. Bahkan seorang tokoh seperti seorang Bung Hatta pun ikut menyampaikan kritiknya atas intervensi pemerintah tersebut. (Anwar, 1995: 259).

Ada hal lain yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antara Pemerintah Orde baru awal (periode tahun 1970-an hingga tahun 1980-an) dengan Islam, yakni adanya kecurigaan. Dalam hal ini adanya kecurigaan dari pemerintah terhadap apa yang telah dilakukan umat Islam sehubungan dengan adanya berbagai peristiwa pergolakan sosial, seperti Peristiwa Malari, Tanjung Priok, Semanggi, Trisakti, dan sebagainya. Terjadinya pergolakan sosial tersebut dari kalangan elite Orde Baru, dicurigai sebagai tanda adanya “Gerakan untuk mendirikan negara Islam”, walaupun sebenarnya kalau ditelusuri latar belakang terjadinya pergolakan sosial itu lebih disebabkan pada masalah keresahan (kesenjangan) sosial-ekonomi (Anwar, 1993: 137). Kecurigaan pemerintah Orde Baru yang lain adalah ketika umat Islam menuntut agar pemerintah membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan dan sekaligus meminta izin untuk mendirikan Partai Masyumi. Akan tetapi ternyata usaha mereka tidak berhasil. Hal ini dikarenakan pemerintah beranggapan jika partai Islam diperbolehkan didirikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan dan mengganggu pembangunan nasional.

Sehubungan dengan adanya gambaran ketidakharmonisan hubungan antara Pemerintah Orde Baru dengan umat Islam di Indonesia di atas maka dalam dinamikanya muncullah ICMI. Keberadaan ICMI dianggap oleh berbagai kalangan berdampak positif bagi perkembangan umat Islam. Dengan begitu, hadirnya ICMI bisa dikatakan kecurigaan pemerintah terhadap umat Islam telah berakhir. Adanya kondisi tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti tentang dinamika ICMI. Agar penelitian ini lebih fokus maka peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan



dalam tulisan ini. (1) Bagaimanakah latar belakang kelahiran ICMI? (2) Apa saja ideologi yang diusung oleh ICMI? (3) Mengapa ICMI mengalami dinamika?

B. Sejarah Berdirinya ICMI

Menurut Dawam Rahardjo, ide pendirian ICMI sebenarnya sudah lama beredar di kalangan cendekiawan muslim. Bermula dari pertemuan dari para cendekiawan muslim untuk yang pertama kalinya di tahun 1984. Pada pertemuan pertama tersebut penyelenggaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2 universitas Islam, dan 4 lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara itu yang memotori adanya pertemuan tersebut adalah Lembaga Studi Agama Dan Filsafat (LSAF). Pada tahun 1987, ada pertemuan cendekiawan muslim di kampus Universitas Djuanda, Bogor. Dalam pertemuan itu, teretus lagi gagasan untuk membentuk ikatan cendekiawan muslim. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata gagasan untuk membentuk ikatan cendekiawan muslim itu juga muncul dari Makassar dan Surabaya. Oleh karena mempunyai gagasan yang sama, maka untuk menyatukan mereka, dibentuklah Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI). Adapun ketuanya adalah Letjen (purn.) Achmad Tirtosudiro. Menurut Dawam Rahardjo, inilah sebenarnya cikal bakal yang sesungguhnya dari ICMI. Sementara itu ICMI yang dibentuk secara administratif di Malang pada tanggal 7 Desember 1990 hanyalah suatu gerak terakhir.

Kelahiran ICMI diawali dari diskusi sekelompok mahasiswa Teknik Universitas Brawijaya (UNIBRAW), Malang. Para mahasiswa tersebut tergabung dalam kelompok kerohanian Islam. Sekelompok mahasiswa tersebut merasa prihatin dengan masa depan umat Islam, mengingat pada masa itu telah terjadi perpecahan di kalangan para cendekiawannya. Dengan kondisi tersebut, seolah-olah telah terjadi polarisasi kepemimpinan kaum muslim. Setiap kelompok Islam berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan “aliran” masing-masing. Dalam hal ini, ada kelompok “Paramadina” di Jakarta, “Salman” di Bandung, “Salahuddin” di Yogyakarta, “Al Falah” di Surabaya, dan lain-lain. Pada waktu itu belum ada wadah pemersatu kelompok-



kelompok Islam tersebut. Padahal masalah yang akan dihadapi kaum muslim, baik di masa itu maupun di masa yang akan datang, tentunya amatlah krusial. Kondisi yang demikian itulah membuat keprihatinan dari sekelompok mahasiswa Unibraw. Untuk menindaklanjuti keprihatinan mereka tersebut lalu mereka berkonsultasi kepada Rektor Unibraw dan Rektor Universitas Muhammadiyah (UNMUH). Selain berkonsultasi dengan kedua rektor yang ada di Malang, para mahasiswa itu juga mendatangi beberapa tokoh di Malang yang dianggap oleh publik sebagai cendekiawan muslim. Setelah mengadakan konsultasi dengan beberapa pihak, akhirnya sekelompok mahasiswa Unibraw itu mengadakan diskusi pertama pada bulan Februari 1990 di Masjid Kampus Unibraw. Hasil dari diskusi itu adalah munculnya gagasan untuk mengadakan sebuah simposium dan pendirian sebuah organisasi yang menghimpun para cendekiawan muslim se-Indonesia. Untuk merealisasikan gagasannya tersebut lalu 5 orang mahasiswa (Erik Salman, Ali Mudakir, Mohammad Zainuri, Awang Surya, dan Mohammad Iqbal) pergi ke Jakarta untuk menemui sejumlah cendekiawan muslim di Jakarta, seperti Imaddudin Abdulrachim, Dawam Rahardjo, Alamsyah Ratu Prawiranegara (alm.), Achmad Tirtosudiro, dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Unissula (Situmorang, 2017: 133-135). Setelah berkonsultasi dengan beberapa tokoh cendekiawan di Jakarta, maka beberapa mahasiswa tersebut diminta untuk menemui langsung B.J.Habibie. Adapun pertimbangannya adalah karena B.J. Habibie merupakan salah seorang Menteri yang dekat dengan pemerintah (Presiden Soeharto) sehingga peluang untuk menggolkan rencana mengadakan simposium dan pembentukan ICMI lebih terbuka peluangnya.

Pertemuan pertama sekelompok mahasiswa dari Unibraw dengan B.J.Habibie berlangsung di Gedung BPP Teknologi (ruang kerja B.J.Habibie) setelah shalat Jum'at, pada tanggal 3 Agustus 1990. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut (yakni kesediaan B.J.Habibie untuk menyampaikan makalah pada acara simposium dan bersedia menjadi calon ketua ICMI) lalu oleh B.J.Habibie, para mahasiswa tersebut diminta untuk menulis surat resmi yang ditujukan kepada B.J.Habibie dan menyampaikan usul



untuk meminta kesediaan B.J.Habibie menjadi ketua dari ICMI. Surat resmi tersebut tentunya dilampiri dengan adanya tandatangan sekurang-kurangnya 50 ilmuwan yang berpendidikan S-3. Tentunya surat tersebut sangat penting keberadaannya untuk menjadi bekal bagi B.J.Habibie meminta persetujuan dari presiden. Meminta persetujuan dan pendapat dari presiden sangatlah penting, karena pada saat itu B.J.Habibie menjabat sebagai Menteri.

Setelah mendapatkan persetujuan dari presiden untuk mensukseskan simposium dan pembentukan ICMI, lalu B.J Habibie membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Wardiman Djojonegoro. Setelah terbentuk panitia, lalu B.J.Habibie mengundang panitia, pimpinan Universitas Brawijaya, Malang serta 49 penanda tangan yang mencalonkannya sebagai ketua ICMI pada tanggal 25 September 1990 di rumah B.J.Habibie, di jalan Patra Kuningan, Jakarta. Dalam waktu yang berbeda, B.J.Habibie juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama, Majelis Ulama, serta beberapa Menteri dalam Kabinet Pembangunan V (seperti: Rudini, Emil Salim, Saleh Afif, Azwar Anas, Nasrudin Sumintapura, dan Fuad Hasan). Para Menteri yang diundang tersebut diminta oleh B.J.Habibie untuk memberikan saran-saran berkaitan dengan simposium dan pencalonan B.J.Habibie sebagai calon ketua ICMI. Setelah para undangan setuju dengan kedua agenda tersebut, maka B.J.Habibie pada tanggal 6-8 Desember 1990 menghadiri Simposium Nasional dengan tema “Sumbangsih Cendekiawan Muslim Membangun Masyarakat Abad XXI” di Universitas Brawijaya, Malang. Pada tanggal 7 Desember 1990 setelah acara simposium selesai, dilanjutkan dengan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Adapun yang menjadi ketua umumnya adalah B.J.Habibie untuk periode 1990-1995 (Makka, 2018: 205-211). Ada tiga dasar yang menjadi pertimbangan, baik dari tim panitia simposium maupun oleh para penandatangan (ilmuwan) yang menyetujui B.J. Habibie menjadi pemimpin ICMI periode pertama. (1990-1995). Pertama, prestasi Habibie sebagai cendekiawan muslim yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Kedua, Meskipun sudah menyanggah jabatan politik, akan tetapi Habibie masih kompeten dalam bidang keinsinyuran maupun manajemen.



Ketiga adalah adanya keyakinan dari para penandatanganan atas keikhlasan Habibie di dalam komitmennya terhadap agama Islam. Selain pertimbangan tersebut, ada lagi alasan mengapa memilih Habibie sebagai ketua ICMI seperti yang dikemukakan oleh Emil Salim bahwa Habibie dianggap sebagai faktor pengintegrasian dari fenomena polarisasi cendekiawan muslim pada waktu itu (Situmorang: 2017, 138-139). Dengan begitu terbentuknya ICMI maka dalam sejarah Indonesia bisa dikatakan sebagai fenomena untuk yang pertama kalinya terjadi setelah Indonesia merdeka yang mana cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang, ilmu, pemikiran, profesi, dan kelompok sosial untuk bersatu dalam naungan satu organisasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapatnya M. Amien Rais yang menyatakan bahwa ICMI merupakan salah satu wadah bersatunya kekuatan Islam yang tersebar dimana-mana, dengan latar belakang aliran politik, profesi, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya dikatakan bahwa di ICMI, bisa ditemukan pakar, teknokrat, ilmuwan, pengusaha, ulama, politisi, dan macam-macam profesi lainnya yang siap untuk mengabdikan dan menyumbangkan karyanya pada negara. (Anwar: 1995, 298).

C. Ideologi ICMI: Islam Kultural

Menurut B.J. Habibie, ICMI bukanlah organisasi politik dan bukan pula organisasi massa yang bernaung di bawah organisasi politik. Adanya harapan agar ICMI tidak berpolitik atau menjadi kekuatan politik, tampaknya tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan sejarah masa lalu. Pada masa Orde Lama, umat Islam cenderung membawa bendera Islam politik dalam setiap gerakannya sehingga berakibat membawa implikasi renggangnya hubungan Islam dengan birokrasi Orde Baru. Sebagai dampaknya adalah peranan dan posisi Islam, terpinggirkan. Agar posisi Islam tidak terpinggirkan maka tujuan didirikan ICMI bukanlah untuk berpolitik praktis, melainkan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas berkarya dan bekerja, serta kualitas berpikir untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Untuk merealisasikan dari tujuan pendirian ICMI tersebut maka ICMI menggunakan pendekatan ideologi Islam kultural.



Yang dimaksud dengan Islam kultural di sini adalah bahwa Islam merupakan salah satu komponen yang membentuk, melandasi, dan mengarahkan bangsa dan negara. Adapun bentuknya bisa berupa kesemarakkan dakwah, meningkatnya publikasi keislaman, kesungguhan untuk berani menampilkan simbol-simbol keislaman lewat pemakaian busana muslim, dan lain-lain. Dengan demikian, Islam kultural tidak mengharuskan terbentuknya negara Islam. Yang paling penting dalam Islam kultural adalah dilaksanakannya nilai-nilai substansi Islam, yakni keadilan. Adapun caranya adalah dengan melakukan akomodasi non-politik terhadap Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dengan menampilkan program-program ICMI yang semuanya bersifat non-politik. Adapun tujuan program ICMI yang ditawarkan adalah untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dengan menggunakan strategi perjuangan yang islami, berwadahkan Pancasila. Gagasan tersebut sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar (AD) ICMI bahwa ICMI adalah organisasi kebudayaan. (M. Syafii Anwar:1995,hlm. 281-300).

Program kerja ICMI yang ditawarkan oleh B.J.Habibie dalam amanat Muktamar ICMI yang pertama di Malang adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya. Penjabaran dari program kerja ICMI tersebut, tersimpul dalam 4 program besar, yakni:

1. Program Pusat Informasi dan Kajian Pembangunan

Meliputi : data base, peta komoditi, dan prospek pasar, ICMI net, pelayanan informasi beasiswa, kajian-kajian strategis, penerbitan khusus dan bantuan untuk penerbitan jurnal (antara lain jurnal berbahasa Inggris *Mizan dan Ulumul Qur'an*).

2. Pengembangan Potensi Sumber Daya Umat Islam

Meliputi: penerbitan koran *Republika*, pesantren dan Pendidikan Islam, pengembangan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, pendirian lembaga keuangan Islam.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembudayaan



Antara lain mendirikan Islamic Center, mengaktifkan cendekiawan muda melalui “Majelis Sinergi Kalam” (MASIKA), ketrampilan sumberdaya.

4. Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya

Meliputi: pengembangan organisasi dan administrasi, Kerja sama kelembagaan, mendirikan Yayasan ICMI, serta silaturahmi kerja.

Sementara itu sasaran yang ingin dicapai dari 4 program besar ICMI tersebut di atas disimpulkan dalam Program 5 K, yaitu:

1. Peningkatan kualitas iman dan takwa

Agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju dalam menghadapi kondisi dunia seperti apapun maka diperlukan bekal iptek (ilmu pengetahuan) dan imtak (iman dan takwa). Disini terlihat jelas, begitu kuat keislaman dan rasa kebangsaan B.J.Habibie. Keislaman dan kebangsaan yang seperti itu oleh B.J.Habibie diwujudkan dalam pelaksanaan *hablum minallah* dan *hablum minannaas* yang sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari (Azwar Anas: 2009, 313-314). Dengan demikian, kalau iptek disenergiskan dengan imtak maka hasilnya adalah sumber daya manusia yang unggul.

2. Peningkatan kualitas berpikir

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas berpikir maka ICMI mendirikan CIDES (Center for Information and Development Studies) dan Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) untuk kalangan intelektual muda. CIDES ditengarai sebagai badan kajian ICMI yang diharapkan dapat menjadi dapur pemikiran yang akan menyuplai ICMI dengan berbagai pemikiran dan analisis. (Anwar:1995, 305). Dalam hal ini, CIDES mempunyai visi sebagai berikut: Terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi, kemandirian, dan kemartabatan sebagai dasar bagi pembangunan bangsa dan negara yang berkesinambungan. Sementara itu misi CIDES adalah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi kendala



dan sedapat mungkin dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada bagi terealisasinya cita-cita luhur di atas, baik melalui kegiatan paparan, dialog, workshop nasional, maupun kajian kebijakan publik dan penelitian di berbagai aspek yang strategis, khususnya aspek ekonomi, politik, demokrasi, dan otonomi daerah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tulisan ini, perlu disampaikan contoh kegiatan paparan strategis CIDES yang sudah dilaksanakan, dengan mengangkat judul ‘Dampak Kenaikan Harga BBM pada Sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Paparan yang telah disampaikan oleh Rohmad Hadiwijoyo (Ketua Dewan Direktur CIDES) berkaitan dengan judul di atas adalah pertama, karena umumnya UMKM menghasilkan barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat maka ketika terjadi krisis ekonomi tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Dalam hal ini, malahan UMKM bisa tetap mampu bergerak dan menyerap tenaga kerja, meski jumlahnya terbatas. Kedua, mengingat pelaku usaha UMKM pada umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatan maka UMKM tetap eksis meski dilanda krisis ekonomi. Faktor ketiga adalah pada umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Demikianlah inti paparan dari CIDES tentang dampak kenaikan harga BBM pada sektor UMKM. Sementara itu kegiatan MASIKA yang sudah dilakukan adalah mengadakan workshop pelatihan jadi fasilitator. Adapun tujuan diadakan workshop tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan fasilitator setiap individu dalam menghadapi perubahan sosial, terutama bagi masyarakat yang berkecimpung di organisasi, akademisi, masyarakat, maupun perusahaan. Perubahan dari *teaching* ke *facilitating* akan menyebabkan tim kerja lebih efektif. Sebagai contohnya, kalau masih ada dosen yang ketika mengajar masih menggunakan



metode klasik yang membuat mahasiswa mengantuk, bosan, bahkan tidak fokus maka diharapkan para peserta setelah mengikuti pelatihan menjadi fasilitator ini, dapat mengubah strateginya dalam mengajar sehingga proses perkuliahan bisa lebih dinamik.

Selain CIDES dan MASIKA, usaha ICMI lainnya dalam rangka peningkatan kualitas berpikir adalah dengan mendirikan MAN Insan Cendekia di Serpong dan di Gorontalo di tahun 2001. Tujuan pendirian MAN Insan Cendekia adalah agar umat Islam mendapatkan pendidikan yang baik, demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan iptek dengan didasari nilai keimanan dan ketakwaan. Perlu dipahami bahwa sebelum didirikan MAN Insan Cendekia, banyak umat Islam yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah sekolah Islam yang baik di Indonesia. Sebagai dampaknya adalah masih minimnya secara persentase pelajar yang dari sekolah Islam yang mampu tembus seleksi untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Kondisi tersebut merupakan suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, mayoritas pelajar Islam itu secara ekonomi di bawah rata-rata dan terpaksa menjalani Pendidikan di sekolah Islam yang mutunya juga di bawah rata-rata. Sebagai akibatnya adalah para pelajar Islam tersebut tidak bisa bersaing dengan saudara-saudara mereka yang berasal dari sekolah-sekolah yang bermutu baik, tetapi umumnya berbiaya mahal. Mereka kalah bersaing dalam seleksi memasuki perguruan tinggi favorit tersebut. Padahal perguruan tinggi favorit tersebut merupakan perguruan tinggi yang mendapat subsidi dari pemerintah, yang justru mahasiswanya berasal dari kalangan yang tidak semestinya mendapat subsidi. Dengan mencermati kondisi Pendidikan pada saat itulah lalu mendorong B.J. Habibie berinisiatif untuk mendirikan lembaga Pendidikan Insan Cendekia. Kurikulum MAN Insan Cendekia berbasis SMU yang diberi penguatan pada mata pelajaran 'mafikib'



(matematika, fisika, kimia, dan biologi). Model dari sekolah ini adalah menerapkan *boarding school* (siswa diasramakan) dan mendapatkan beasiswa penuh selama mengikuti Pendidikan di MAN Insan Cendekia. Beasiswa berasal dari Yayasan beasiswa ORBIT, sebuah lembaga sosial yang didirikan oleh ICMI (Makka:2018, 223-225).

3. Peningkatan kualitas berkarya

Dalam rangka meningkatkan kualitas karya umat Islam pada khususnya maka ICMI berhasil mengangkat derajat penduduk mayoritas yang sudah lama diinisiasi sebagai penduduk yang mengalami ketertinggalan, kaum sarungan, serta predikat lainnya yang menurunkan derajat umat Islam. Padahal dalam sejarah Indonesia, mereka mempunyai peran besar dalam memperjuangkan dan menegakkan keberadaan NKRI. Untuk memulihkan predikat yang merendahkan umat Islam itu lalu lahirlah ICMI. Dalam hal ini, ICMI dipandang sebagai wadah perekat identitas antara berbagai unsur cendekiawan muslim untuk berkarya. Salah satu karya yang digagas Habibie adalah mengembangkan potensi dan kemampuan bangsa Indonesia dibidang industri pesawat terbang. Dengan gagasannya tersebut diakui telah mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, sekaligus menepis pandangan negatif yang mengecilkan kemampuan bangsa Indonesia. (Nasution: 2009,330).

4. Peningkatan kualitas bekerja

Di bidang ekonomi, ICMI berhasil mendirikan Bank Muamalat, BMT (Baitul Maal wa Tanwil) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan tersebut menggunakan prinsip ekonomi Syariah. Dengan begitu, ICMI merupakan pelopor gagasan pendirian lembaga keuangan yang berbasis Syariah dan pengaruhnya terhadap umat Islam untuk bekerja di sektor ini cukup signifikan. (Makka: 1995, 222).

5. Peningkatan kualitas hidup



Seiring dengan adanya pemikiran dan wacana keislaman untuk memberikan pencerahan kepada umat maka ICMI mendirikan *Harian Republika* di tahun 1994. *Harian Republika* ini telah melahirkan lembaga filantropi *Dompot Dhuafa* yang menerima dan menyalurkan milyaran rupiah dana umat untuk kepentingan umat.

Harian Republika bisa berdiri dan berkembang pesat berkat adanya solidaritas masyarakat intelektual, khususnya warga ICMI dan umat Islam pada umumnya. Mereka dengan sukarela membeli saham *Harian Republika* senilai Rp.5.000,-. Dalam hal ini, tiap orang hanya boleh memiliki 1 saham. Adanya kebijakan tersebut membuat *Harian Republika* adalah milik masyarakat luas, khususnya para cendekiawan dan umat Islam. (Makka: 1995,222-223).

Dengan program 5 K tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa B.J.Habibie sebagai ketua umum ICMI ada kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Inilah bentuk pemberdayaan program ICMI yang telah tampak nyata di masyarakat.

D. Dinamika Organisasi (Internal)

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ICMI lahir bukan bertujuan untuk berpolitik. Hal ini tercermin dari semua programnya yang tidak berorientasi ke politik, melainkan ke peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Wardiman Djojonegoro yang menyatakan bahwa kalau ICMI berpolitik maka semestinya ICMI berbentuk partai. Akan tetapi faktanya ICMI ini bukanlah berbentuk partai, akan tetapi merupakan sebuah lembaga yang lahir dalam rangka untuk mengumpulkan para cendekiawan muslim atau orang-orang pintar untuk dapat ikut berpartisipasi bersama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. (Djojonegoro: 2009, 318). Di dalam *Anggaran Rumah Tangga (ART)* ICMI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cendekiawan muslim adalah seseorang atau sekelompok orang Islam yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikir, menggali, memahami,



dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk diabdikan bagi kesejahteraan umat Islam (Anwar, 1993: 302). Dengan adanya definisi cendekiawan muslim tersebut maka berarti anggota ICMI sangatlah heterogen sebab di ICMI ada berbagai latar belakang pendidikan, profesi, ekonomi, aliran politik, dan sebagainya. Menurut Amin Rais bahwa dengan keanggotaan ICMI yang heterogen itu justru malahan bisa menguntungkan bagi umat Islam. Bisa dikatakan demikian karena yang semula kekuatan Islam tersebar dimana-mana dan berjalan sendiri-sendiri, namun kemudian mereka (cendekiawan muslim) bersatu dan bergabung sebagai anggota ICMI yang siap untuk mengabdikan dan menyumbangkan karyanya pada negara (Anwar, 1993: 153). Meski tujuan berdirinya ICMI bisa dikatakan baik, namun tanggapan masyarakat (orang Islam) tentang berdirinya ICMI sangat beragam. Dalam hal ini telah muncul tiga pendapat tentang keberadaan ICMI, ada yang menaruh harapan, yang meragukan, dan melihatnya sebagai ancaman.

Pertama, adalah orang Islam yang menaruh harapan kepada ICMI. Yang termasuk golongan ini adalah kebanyakan generasi tua yang pernah mengalami pahit getirnya Islam sebagai agama kaum pinggiran. Kelompok yang menaruh harapan terhadap ICMI dibagi ke dalam tiga golongan, yakni (1) Melihat ICMI sebagai sebuah kemungkinan untuk ladang berdakwah (seperti: MUI, DDII, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya); (2) Melihat ICMI sebagai sarana peningkatan peran sosial umat, terutama peran agama. Yang termasuk golongan ini adalah orang awam. Golongan ini sudah akan merasa puas jikalau maraknya agama ada di mana-mana, seperti adanya dakwah yang bebas, adanya dukungan dari birokrasi dalam kegiatan keagamaan, banyaknya birokrat yang menjalankan agama, dan sebagainya; dan (3) Yang berpikir politik, artinya mengharapkan peran politik ICMI, seperti maraknya isu tentang Neo-Masyumi.

Kedua, adalah orang Islam yang meragukan keberadaan ICMI. Yang termasuk kelompok ini adalah mereka yang melihat ICMI sebagai hasil kooptasi negara atas umat. Ada 3 golongan yang termasuk dalam kelompok ini, yakni (1) Yang relatif pasif, artinya meskipun



mereka tidak setuju terhadap ICMI, namun mereka membiarkannya ICMI bekerja. Mereka itu adalah Deliar Noer, Ridwan Saidi, dan Emha Ainun Nadjib; (2) Yang agresif, seperti Abdurrahman Wahid, yang mengatakan bahwa ICMI itu sektarian dan primordial; dan (3) Yang tidak puas dengan ICMI. *Ketiga*, adalah orang Islam yang melihat ICMI sebagai ancaman. Yang termasuk golongan ini adalah (1) Orang-orang lama yang tidak setuju dengan Islam-politik (jangan disebut “musuh” sebab musuh yang sesungguhnya bagi orang Islam adalah orang kafir, musyrik, dan munafik) dan golongan yang ke (2) adalah generasi muda yang melihat ICMI sebagai penghalang proses demokratisasi.

Berdasarkan ketiga pandangan yang muncul dari umat Islam di atas maka paparan berikut ini adalah analisa dari Kuntowijoyo sehubungan dengan keberadaan ICMI. Menurut Kuntowijoyo, adanya harapan kepada ICMI agar umat Islam tidak terpinggirkan, dapat ditelusuri dari peristiwa sejarah. Di masa kolonial, jelas-jelas umat Islam terpinggirkan. Hal ini tampak dari adanya jabatan tertinggi umat dalam birokrasi adalah bupati, itupun dipilih dari para ningrat dan yang agamanya “longgar”(abangan). Yang agama Islamnya kuat, paling-paling hanya diangkat sebagai penghulu. Pada masa pendudukan Jepang, umat Islam dimobilisasikan untuk menyukseskan perang. Strategi politik tersebut tentunya merupakan suatu kooptasi negara atas umat sehingga lalu dibentuklah Jawatan Agama, indoktrinasi politik ulama, dan Hizbullah. Pada masa penjajahan, hanya mereka yang melek huruf Latin yang dianggap tidak buta huruf, sedangkan mereka yang melek huruf Arab dan Daerah dianggap buta huruf. Pada waktu terjadi rasionalisasi dalam tubuh TNI, karena mereka berasal dari sekolah agama (seperti Mambaul Ulum di Surakarta) maka mereka terpaksa harus melepaskan pangkatnya. Jadi hanya karena bersekolah di sekolah agama, umat Islam terpinggirkan. Sementara itu pada masa Orde Baru, hubungan umat Islam dengan birokrasi pemerintah Orde Baru pun juga kurang harmonis. Kondisi tersebut terutama terjadi pada tahun 1970-1980. Pada saat itu banyak terjadi pergolakan sosial yang mengatasmakan agama seraya melakukan oposisi keras terhadap negara. Sebagai



contohnya adalah peristiwa Tanjung Priok, Peledakan BCA, Kasus Lampung dan, lain-lain. Dengan adanya peristiwa tersebut, umat Islam disudutkan dengan ungkapan 'ekstrem kanan', golongan anti Pancasila, melawan Orde Baru, dan sebagainya. Adanya ungkapan-ungkapan tersebut menyebabkan terjadilah benturan ideologis antara Islam dengan negara. Oleh karena itu, dengan hadirnya ICMI umat Islam mempunyai harapan besar agar kegiatan-kegiatan keagamaan bisa lebih semarak tanpa mendapat tekanan ataupun kecurigaan dari elite birokrasi Orde Baru.

Ada yang melatarbelakangi mengapa ada sebagian umat Islam yang meragukan kemampuan ICMI dalam menjembatani polemik antara Islam dengan Pemerintah Orde Baru. Perlu diketahui bahwa ICMI itu adalah ormas agama dengan spesialisasi gerakan sosial dan kebudayaan, bukan gerakan politik. Yang dimaksud ICMI sebagai gerakan kebudayaan adalah gerakan penyadaran dan pembentukan simbol. Sementara itu, ICMI sebagai gerakan sosial diartikan sebagai pemberdayaan umat. Pemberdayaan umat di sini diartikan sebagai usaha agar umat Islam menjadi orang yang kuat, mandiri, mampu, dan sejenisnya. Sebagai gerakan kebudayaan dan sosial maka ICMI mempunyai strategi *long march* (jangka panjang) dalam memperdayakan umat (memerangi kemiskinan, kebodohan umat, dan bangsa Indonesia pada umumnya) ke masa depan, yakni dengan membekali imtak (iman dan takwa) dan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Ini artinya bahwa ICMI harus mengusahakan untuk melakukan mobilitas sosial umat. Adapun caranya adalah dengan cara mempersiapkan kualitas SDM. Oleh karena strateginya *long march* dalam mempersiapkan kualitas SDM maka sering kali umat dan masyarakat bawah yang sudah lama menderita, tidak sabar menunggu hasilnya sehingga wajarlah kalau di masyarakat lalu muncul pendapat yang kedua (meragukan keberadaan ICMI). Seperti yang diibaratkan oleh Kuntowijoyo, kalau orang menanam padi dapat mengharapkan panen dua kali dalam setahun, kalau tebu satu setengah tahun, dan kalau menanam mangga dapat dipetik buahnya setelah lima tahun (itu adalah ibaratnya untuk jangka pendek). Akan tetapi kalau menanam pohon jati, butuh waktu lima belas sampai lima puluh tahun untuk



bisa panen (itu adalah ibaratnya untuk program jangka panjang). Itulah ICMI ibaratnya seperti menanam pohon jati. Adapun yang melatarbelakangi munculnya pendapat yang ketiga (ICMI sebagai ancaman) adalah karena menganggap ICMI sebagai gerakan politik sehingga dengan munculnya ICMI dikira sebagai penghambat demokrasi. Padahal menurut Kuntowijoyo, ICMI adalah gerakan sosial-kebudayaan, bukan gerakan politik. Adanya kesalahpahaman dalam memahami gerakan ICMI inilah maka menjadi tugas cendekiawan pada khususnya untuk memberikan penyadaran pada mereka yang masih mempunyai pandangan yang keliru bahwa ICMI adalah gerakan politik. (Kuntowijoyo, 2001: 82-89).

Sehubungan dengan adanya analisa dari Kuntowijoyo tentang keberadaan ICMI di atas dan adanya pernyataan B.J. Habibie pada Mukhtar I di Malang yang menyatakan bahwa ICMI yang lahir pada tahun 1990 bukan karena alasan politik melainkan untuk mengumpulkan para cendekiawan muslim dalam rangka untuk ikut berkiprah memecahkan persoalan bangsa dan negara, terutama persoalan kemiskinan dan kebodohan. Hal ini terlihat dari program-programnya yang tampaknya tidak ada unsur politiknya. Meski awal-awal kelahirannya, ICMI tampak seolah-olah tidak berpolitik praktis, akan tetapi dalam perjalanannya kemudian, muncul perkembangan baru dalam perpolitikan nasional di Indonesia. Dikatakan demikian karena masyarakat dikejutkan dengan pemandangan yang mewarnai pada Sidang Umum MPR 1993, yang mana tampak sejumlah tokoh ICMI duduk di kursi MPR. Oleh karena itu kemudian banyak orang yang memberi label “*ijo royo-royo*” kepada anggota MPR tersebut. Menurut A. Watik Pratiknya, kondisi seperti itu wajar saja karena sebagai intelektual Islam, mereka dianggap paham akan persoalan-persoalan bangsa secara konseptual sehingga wajarlah kalau mereka menjadi anggota MPR. Sementara itu menurut Afan Ghaffar, adanya sejumlah tokoh ICMI yang menjadi anggota MPR ini merupakan bagian dari politik akomodasi Orde Baru terhadap Islam. Penerapan politik tersebut dalam rangka meminimalisir benturan-benturan yang sebelumnya telah terjadi. Perlu diketahui bahwa sejak Orde Baru tokoh-tokoh Islam berada di pinggiran percaturan politik.



Dengan pemberian akomodasi tersebut diharapkan akan mengurangi sikap oposan kelompok Islam. Dengan semakin hijauanya MPR maka umat Islam diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap negara. Menanggapi pertanyaan dari wartawan Tempo tentang banyaknya orang ICMI yang menjadi anggota MPR, Habibie secara diplomatis menjawab kalau memang seharusnya begitu. Sebagai seorang cendekiawan, mereka adalah orang yang benar-benar bisa membaca kehendak rakyat dan ikut memberikan resonansi terhadap getaran rakyatnya. Sementara itu, dalam pandangan Nurcholish Madjid pun ketika melihat hijauanya MPR itu adalah sesuatu yang wajar karena dari situ telah terjadi pertemuan antara kondisi obyektif dan keinginan subyektif (ada faktor Pak Harto dan ada keinginan masyarakat). Persoalan hijau itu akan berlanjut menuju pada perimbangan baru (Anwar, 1995: 305-306).

Selain dianggap berhasil menghijaukan MPR, B.J. Habibie juga dianggap telah berhasil memasukkan sebagian besar “orang-orangnya” untuk menjadi Menteri dalam Kabinet Pembangunan VI di tahun 1993. Secara kebetulan, mereka yang disebut sebagai “orang-orangnya” Habibie adalah orang yang menjadi pengurus ICMI. Dengan begitu maka Habibie dianggap sebagai Menteri yang berhasil menggusur dominasi kaum teknokrat dan Menteri non-muslim yang ada pada kabinet sebelumnya. Dengan begitu menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Islam telah semakin mendominasi politik Indonesia. Berbagai media cetak pun membuat spekulasi bahwa susunan Kabinet Pembangunan VI tidak bisa dipisahkan dari campur tangan politik Habibie. Namun ada kalangan yang mempunyai pendapat lain bahwa keberhasilan Habibie memasukkan orang-orangnya ke dalam susunan Kabinet Pembangunan VI yang kebetulan pengurus ICMI, itu merupakan konsekuensi logis dari “bulan madu” antara ICMI dengan pusat kekuasaan. Sementara kalangan lain berargumen bahwa keberhasilan Habibie memasukkan orang-orangnya ke dalam susunan Kabinet Pembangunan VI lebih disebabkan oleh faktor kedekatan hubungan pribadi Habibie dengan Presiden Soeharto. Argumen tersebut diperkuat dengan fakta bahwa para Menteri yang disebut-sebut sebagai “kelompok Habibie” itu, sebelum menjadi pengurus



ICMI, mereka sudah menjadi pembantu dekat, tangan kanan, atau kolega Habibie di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Dengan demikian, ada kesan seolah-olah yang dapat menduduki kursi kabinet adalah orang-orang yang menjadi tangan kanan Habibie. Dengan adanya kondisi tersebut secara sadar atau tidak sadar tentunya menimbulkan semacam kekecewaan secara diam-diam dari kalangan anggota ICMI sendiri. Mereka yang tidak masuk kabinet bahkan sempat mempertanyakan apakah yang menduduki jabatan di kabinet Pembangunan VI itu adalah para ICMI birokrat atau birokrat yang di ICMI kan. (Anwar, 1995: 309).

Selama periode tahun 1993, B.J. Habibie memang telah banyak melakukan langkah-langkah politik yang tidak banyak diketahui maksudnya oleh pengurus ICMI. Selain contoh yang telah dipaparkan di atas (menghijaukan anggota MPR dan susunan kabinet pembangunan VI), juga ada contoh lainnya. Pada bulan Juli 1993, B.J. Habibie mengundang kelompok “Petisi 50” untuk mengunjungi PT PAL di Surabaya dan IPTN di Bandung. Pada bulan Agustus 1993 B.J. Habibie dengan mengajak beberapa pengurus ICMI untuk ikut silaturahmi kepada Presiden Soeharto, Wapres Try Sutrisno, dan mantan Wapres yaitu Sudharmono. Adapun tujuannya adalah untuk meminta mereka sebagai pelindung pengurus ICMI. Setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan silaturahmi di markas besar ABRI Cilangkap untuk menemui Pangab Jenderal Feisal Tanjung. Langkah politik lainnya adalah memasukkan cendekiawan muda ICMI dalam kepengurusan Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golongan Karya pada tanggal 20-25 Oktober 1993. Selain ada manuver politik di partai, B.J. Habibie diduga terlibat juga dalam pemilihan calon pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut sehingga menyebabkan ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa kalau seseorang menginginkan jabatan dan kariernya bisa berkembang dengan cepat maka dia perlu menjalin hubungan dengan Habibie dan juga”berbaik-baik” dengan ICMI.

Langkah-langkah politik yang telah dilakukan B.J. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI sepanjang tahun 1993 tersebut di atas ternyata membawa pengaruh pada pandangan berbagai kalangan



terhadap eksistensi ICMI. Pertama, ada yang mempunyai pandangan bahwa ICMI telah menjadi bagian dari dan bermain dengan kekuasaan dan politik praktis. Meski opini tersebut kelihatannya bersifat subyektif (karena harusnya dibedakan antara tindakan Habibie sebagai pribadi dan posisinya sebagai ketua umum ICMI), namun masyarakat tetap saja mengaitkan langkah politik Habibie tersebut sebagai bagian dari langkah politik ICMI. Pandangan yang kedua adalah ada semacam kekawatiran dan kecurigaan dari kelompok lain dan kalangan non-muslim tertentu yang menilai bahwa ICMI telah dan akan terus melakukan politik sektarian yang sedang mencoba untuk menggusur kekuatan politik lainnya. Tampaknya gejala tersebut muncul karena adanya semacam kecemburuan politik pada ICMI yang dianggap telah mendapat *privilege* (hak istimewa) politik tertentu dari pemerintah. Meski kondisinya seperti itu namun seiring dengan berjalannya waktu (ketika muncul adanya isu suksesi kepemimpinan Nasional, demokratisasi, arus bawah yang mulai menguat, dan sebagainya) maka politik yang dijalankan birokrat Orde Baru mulai terganggu sehingga berdampak pada kiprah politik pada tubuh ICMI. Hal ini tampak pada kesemarakannya ICMI pada periode tahun 2000-an.

Memasuki dekade 2000-an, kiprah ICMI mulai redup gaungnya. Hal ini dikarenakan suasana politik dalam negara pada masa Orde Baru dengan masa Reformasi berbeda. Pada masa Orde Baru, memang belum begitu banyak umat Islam yang dianggap bisa memberikan wahana bagi kelompok intelektual untuk melakukan mobilitas ke atas, baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Bahkan selama bertahun-tahun kelompok intelektual dan umat Islam terpojokkan oleh penguasa dan terpaksa umat Islam harus tiarap. Oleh karenanya di masa Orde Baru, kehadiran ICMI adalah wadah yang dinanti-nantikan kehadirannya, yakni sebagai wadah untuk melakukan mobilitas. Setelah ICMI berdiri, banyak umat Islam yang masuk menjadi anggota ICMI. Ada yang masuk ICMI memang tulus untuk melaksanakan perjuangan program ICMI, namun ada juga yang hanya sekedar “numpang”. Sementara itu, pada masa Reformasi (setelah tahun 1998), suasana perpolitikan di Indonesia agak melunak. Dikatakan demikian karena pada masa ini, orang bebas mendirikan



partai politik atau organisasi. Kelompok menengah muslim yang mempunyai keinginan untuk melakukan mobilitas politik atau ekonomi sudah bisa tersalurkan melalui partai-partai. Dalam hal ini, ICMI bukan tempatnya karena ICMI bukan untuk mendapatkan panggung politik dan kekuasaan (Makka, 2018: 226).

E. Gerakan Sosial Keagamaan

Di Indonesia ada 3 strategi pergerakan Islam yang dikenal, yaitu strategi struktural, strategi kultural, dan strategi mobilitas sosial. Pertama, strategi struktural. Strategi struktural disebut juga strategi politik karena strategi struktural menggunakan sarana politik. Contoh Lembaga Islam yang menggunakan strategi struktural adalah FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) yang diketuai oleh Anwar Harjono dan KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam) yang diketuai oleh A. Sumargono. Bentuk strategi struktural yang dipakai FUI adalah apel akbar, sedangkan KISDI melakukan demonstrasi, doa politik, dan “*sowan* politik.” Sementara itu, contoh perorangan yang menggunakan strategi struktural adalah K.H Abdurrahman Wahid. Pada tahun 1980-an pernah K.H. Abdurrahman Wahid membawa L.B. Moerdani ke pesantren-pesantren, berkunjung ke Israel, dan terakhir bersimpati dengan DPP PDI Megawati. Adapun tujuannya adalah untuk berusaha meyakinkan pada orang non-Islam bahwa Islam itu longgar, lapang dada, dan pluralis. Berdasarkan contoh-contoh di atas maka bisa dikatakan bahwa tampaknya selama ini strategi struktural dalam Islam hanya dipakai untuk isu-isu yang sifatnya abstrak saja, seperti amar ma’ruf nahi munkar, sedangkan untuk isu-isu yang konkret kurang peka, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Jadi strategi struktural merupakan strategi yang berusaha untuk mempengaruhi struktur politik (dalam hal ini legislatif dan eksekutif).

Kedua, strategi kultural. Strategi kultural itu berusaha mempengaruhi perilaku sosial (cara berpikir masyarakat). Cara utama strategi kultural adalah penyadaran (simposium, seminar, penerbitan, dakwah, lobi, media massa, dan lain-lain) yang sifatnya individual (mempengaruhi perorangan). Kata kunci dari strategi kultural adalah



agama sebagai moral, etika, intelektual. Pernyataan bahwa agama sebagai kekuatan moral berarti tidak ada paksaan, semuanya harus datang dari dalam. Agama adalah sumber inspirasi, dalam arti ajaran-ajaran agamanya dapat menjadi petunjuk untuk berperilaku, misalnya perilaku politik, bisnis, birokrasi, dan industri budaya (media cetak, media elektronik). Dalam hal ini, perorangan maupun lembaga bisa menggunakan strategi kultural ini. Untuk kategori perorangan, contohnya adalah Nurcholish Madjid, M. Dawam Rahardjo, dan Emha Ainun Nadjib. Ketiga orang itu telah berjasa lewat penerbitan-penerbitan untuk mengubah cara berpikir umat dan cara merasa umat. Nurcholish Madjid berjasa dalam mengubah cara berpikir politik dari eksklusif (kita vs mereka) menjadi inklusif (*ngrengkuh*), M. Dawam Raharjo yang berjasa telah mengubah supaya umat berpikir secara intelektual berdasar sumber-sumbernya sendiri (Lembaga pesantren, tafsir Al-Qur'an, ekonomi Islam), sedangkan Emha Ainun Nadjib berjasa dalam kesenian dengan menunjukkan bahwa Islam itu universal. Jadi dalam strategi kultural itu menginginkan adanya perubahan dari dalam. Adapun tujuannya adalah mengubah cara berpikir perorangan. Strategi kultural ini menggunakan strategi jangka panjang sehingga keberhasilannya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Sementara itu contoh untuk lembaga yang menggunakan strategi struktural adalah NU dan Muhammadiyah. Kedua Lembaga itu berjasa dalam bidang dakwah. Dengan dakwah, kedua lembaga tersebut ikut menyumbang Pendidikan agama di sekolah dan universitas umum sehingga sebutan abangan dan santri menjadi hilang.

Ketiga adalah strategi mobilitas sosial. Strategi mobilitas sosial merupakan salah satu strategi yang dipakai oleh ICMI. Strategi ini bertujuan untuk membawa umat pada *long march* menuju masa depan yang lebih baik (melalui program-programnya). Sebagai contoh, ICMI melalui CIDES mengadakan seminar tentang politik, tujuannya bukan politik praktis jangka pendek, melainkan pendidikan politik jangka panjang. Adanya program Orbit (Orangtua Bimbing Terpadu) adalah program jangka panjang untuk mobilitas sosial umat. Program wakaf buku juga ditujukan untuk melakukan pencerahan umat jangka



panjang. ICMI juga menjalin kerja sama dengan pesantren untuk mengenalkan *high-tech*. Dengan menguasai teknologi tinggi maka masa depan ada di tangan umat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ICMI dalam gerakannya menggunakan strategi mobilitas sosial yang berusaha secara kolektif maupun individual agar umat dapat naik kelas (sosial) untuk jangka panjang. Adapun metodenya adalah Pendidikan SDM, yang mana tidak hanya sekedar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saja, namun juga sadar bahwa Pendidikan SDM itu penting untuk mobilitas sosial (Kuntowijoyo: 2001, 112-125).

F. Penutup

Berdasarkan paparan di atas maka pada bagian penutup ini perlu disampaikan bahwa kelahiran ICMI pada tanggal 7 Desember 1990 dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan umat Islam dengan elite Orde Baru yang kurang harmonis. Posisi umat Islam terpinggirkan. Namun disisi yang lain, pada saat itu kondisi umat Islam masih terkotak-kotak, artinya mereka berjuang sendiri-sendiri hanya untuk aliran atau golongan mereka saja. Padahal masalah-masalah bangsa dan negara pada umumnya dan umat Islam pada khususnya di masa depan itu sangat krusial. (seperti masalah kemiskinan dan kebodohan umat). Untuk mengatasi masalah-masalah bangsa, maka umat Islam haruslah bersatu, jangan terkotak-kotak. Selanjutnya atas inisiatif para mahasiswa Unibraw Malang dan didukung oleh para cendekiawan muslim maka terbentuklah ICMI sebagai wadah pemersatu umat yang mana anggotanya berasal dari latarbelakang, pendidikan, ekonomi, aliran agama yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi ketua umum ICMI I adalah B.J. Habibie.

Kehadiran ICMI dipangung sejarah tanah air kita, diakui atau tidak, telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan kita terutama di belantara perpolitikan nasional. Meski secara legal formal, ICMI tidak bersinggungan dengan politik (hal ini dilihat dari beberapa program kerjanya), namun siapapun mengakui bahwa ICMI, atau lebih tepatnya Habibie-lah yang memegang peran dalam menentukan wajah beberapa institusi di negeri ini. Sebagai contohnya adalah



banyaknya anggota ICMI yang masuk sebagai anggota legislatif (MPR), masuknya beberapa pengurus ICMI menjadi anggota Kabinet Pembangunan VI, dan sebagainya. Dengan maraknya anggota ICMI masuk dalam birokrasi maka perpolitikan di Indonesia lebih didominasi oleh umat Islam. Perubahan yang terjadi di ICMI, yang semula tidak berpolitik tapi kemudian berpolitik dikarenakan dampak ICMI menggunakan pendekatan budaya (melobi elite Orde Baru) dalam menggolkan program-programnya.

Daftar Pustaka

- Sugiarto, Raden Toto, *“Biografi Politik Habibie: Dari Malari Sampai Reformasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017
- Situmorang, Jonar T.H., *B.J.Habibie Si Jenius:Sehimpun Cerita, Cita, dan Karya*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017
- Makmur, A.Makka, *Mr.Crack Dari Parepare: Dari Ilmuwan Ke Negarawan Sampai Minandito*, Jakarta: Republika, 2018
- Soeharto, dkk., *Testimoni Untuk B.J. Habibie*, Yogyakarta: Ombak, 2009
- Syafi'i, M.Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Muzani, Saiful dkk., *Pembangunan Dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1993
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid :Esai-Esai Agama,Budaya, Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung:Mizan, 2001
- Bimosena, Arimbi, *Pesawat Habibie: Sayap-Sayap Mimpi Indonesia*, Jakarta:Kata media, 2014